

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Signifikan Penelitian

Pada Era Reformasi, peran organisasi pemberdayaan perempuan mampu memberikan inovasi-inovasi bagi kaum wanita dalam upaya pemberdayaan keluarga serta pemberdayaan terhadap masyarakat. Upaya pemberdayaan diwujudkan oleh negara melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan salah satu organisasi yang telah terbentuk sejak tahun 1957. Namun, pemberian dukungan dana dari anggaran daerah pada PKK baru dilakukan ketika Orde Baru.

Orde Baru dimulai ketika Soeharto telah memperoleh mandat kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Rezim Soeharto berpandangan bahwa Orde Baru diawali dengan masyarakat dan politik di Indonesia yang mengalami ketidakteraturan dan kekacauan, sehingga Orde Baru muncul untuk membentuk sistem yang mereka bangun. Ketidakteraturan dan kekacauan terlihat pada demonstrasi mahasiswa terhadap Orde Lama untuk menuntut pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga sembako. Sehingga, Orde Baru bertekad untuk memberlakukan keteraturan, sistem, dan kepatuhan dalam masyarakat melalui kontrol sosial politik.

Kontrol sosial yang dilakukan Orde Baru salah satunya adalah upaya yang melibatkan kaum wanita agar dapat berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan dengan melakukan depolitisasi sistematis peran wanita melalui 'Ibuisme Negara'. Berdasarkan (Dewi, 2016) Orde Baru mengimplementasikan *State Ibusm* melalui dua jenis program yakni program yang difokuskan pada kedudukan wanita sebagai ibu dan istri yang bertujuan untuk mengontrol posisi- posisi wanita di dalam negara melalui program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan sasaran perempuan desa dan program yang difokuskan pada kedudukan reproduksi wanita untuk mensukseskan program penurunan jumlah penduduk Orde Baru melalui KB. Kedua jenis program tersebut, dipraktekan melalui organisasi PKK dan Dharma Wanita. Hal ini juga didukung berdasarkan kolom berita kolom berita (<https://www.kompasiana.com/>, 2019), pemerintah Orde Baru memberikan wadah

bagi wanita dengan menciptakan organisasi Dharma Wanita serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Agenda depolitisasi gender Orde Baru bukan untuk menghilangkan kekuatan wanita, melainkan untuk mewujudkan pembangunan nasional dengan merekrut wanita melalui cara-cara disiplin gender. Salah satu organisasi yang sampai saat ini masih bertahan adalah PKK.

Gerakan PKK bermula pada bulan Mei tahun 1962, yang diprakarsai oleh istri Gubernur Jawa Tengah Isriati Moenadi yang prihatin dengan kondisiarganya. Isriati membentuk PKK dengan kepanjangan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Karena program PKK Isriati sukses, tahun 1971 Menteri Dalam Negeri yakni Basuki Rahmat memberikan instruksi agar PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia mulai tingkat provinsi hingga ke tingkat kelurahan dan desa serta memperoleh anggaran dari anggaran daerah. Setelah itu, Ia mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 1972, yang isinya adalah merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 November 2000 di Bandung, Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK yang dipimpin oleh Istri Suryadi Sudirdja. Kemudian menghasilkan pokok-pokok kesepakatan, antara lain perubahan pengertian dan nomenklatur gerakan PKK. Arti PKK kembali berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK. (Suryakusuma, 2011)

PKK pada zaman Orde Baru merupakan perantara antara pemerintah yang otoriter untuk memberikan pengaruh sosial, budaya, politik, ekonomi dan ideologi. Secara ideologi, PKK merupakan perantara antara Pancasila melalui penyebaran 'Ibuisme Negara'. Ideologi disiplin gender itulah yang digunakan Orde baru untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Ideologi tersebut menepatkan peran perempuan bagi negara yakni, 'Ibuisme Negara'. 'Ibuisme Negara' adalah ideologi mengenai peran perempuan sebagai pendamping dan pendukung suami, pendidik anak serta aktor yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan negara. Namun, gerakan PKK saat itu, dikontrol oleh pembina pria dari Korps Pegawai Republik Indonesia disetiap tingkat

Salsabila Khalilah Saputri, 2021

IBUISME NEGARA ERA REFORMASI PADA GERAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA SUMBER JAYA, KABUPATEN BEKASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

pemerintahan dengan menunjuk istri kepala desa atau lurah menjadi Ketua PKK untuk menjalankan program ekonomi rumah tangga dengan dalih “Kesejahteraan Keluarga”. Dan gerakan PKK saat itu, berorientasi pada kaum wanita elite kota yang sering kali tidak sesuai dengan kehidupan wanita di desa namun justru dipaksakan dalam upaya memobilisasi masyarakat demi kepentingan negara.

Upaya mewujudkan ibuisme sejak Orde Baru hingga saat Reformasi tetap berlangsung dan dimenisfetasikan pada gerakan PKK. (Suryakusuma, 2011) menyatakan bahwa PKK menjadi badan perantara utama antara negara dengan wanita desa. PKK memperantarai kekuasaan negara yang otoriter dan paternalistis melalui berbagai wilayah pengaruh: sosial, budaya, ideologis, politik, dan ekonomi. Memperantarai kekuasaan negara secara politis, memperantarai gagasan tentang ibu rumah tangga dan norma keluarga batih secara ekonomi, dan memperantarai Pancasila melalui penyebaran ibuisme negara secara ideologis.

Di masa Orde Baru, PKK kerap dijadikan perlengkapan politik kekuasaan dari kekuatan politik tertentu seperti Golkar. Sejak awal berdiri, PKK dirancang oleh Orde Baru guna menunjang program pembangunan pemerintah mulai dari tingkatan dusun melalui 10 program utama PKK (Dasa Wisma). Masyarakat, memahami citra kader PKK yang militan serta pekerja keras justru di tingkat berbasis perdesaan serta paling utama kaum ibu yang berfungsi di bidang kesehatan wanita serta anak melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu).

Pasca Reformasi 1998, PKK bukan lagi organisasi yang strategis serta progresif. PKK dihujani kritik sebagai organisasi yang menyuburkan *nation* ibuisme negri. Warga makin kritis memperhitungkan PKK sebagai gerakan yang tidak mandiri, sebab jabatan pemimpin ataupun pimpinan regu penggerak PKK menempel pada jabatan suami. Program PKK saat ini, tidak hanya Dasa Wisma namun juga berkaitan dengan perkara yang 40 tahun lalu belum dikira sebagai isu strategis. Perkara baru yang timbul kala ini mencakup fenomena perdagangan wanita serta anak, pekerja migran, HIV/ AIDS, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), dan bermacam isu kekerasan gender.(Soerjipto Ani W. & Shelly Adelina, 2013)

Keberadaan PKK dalam mewujudkan sebuah pemberdayaan mendorong

terwujudnya sebuah ‘Ibuisme Negara’. Peran wanita dalam ‘Ibuisme Negara’ sebagai pendamping suami memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti yang telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 butir ke-3 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga, dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, perempuan diperbolehkan untuk melakukan upaya pemberdayaan di masyarakat.

Salah satu upaya untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat adalah melestarikan lingkungan sebagai wujud untuk pemberdayaan keluarga. Berdasarkan penelitian (Silooy & Pangkey, 2019) mengemukakan:

“Keterlibatan kaum wanita, terutama para ibu dalam mengelola dan melestarikan lingkungan merupakan suatu keniscayaan. Wanita terbukti memiliki kaitan erat dengan lingkungan. Sebagai pengelola rumah tangga, merekalah yang lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan dan sumber daya alam”.

Selain itu, dalam “Ibuisme Negara” perempuan juga berperan sebagai pendidik anak. Menurut (Amalia, 2018) kiat mengasuh dan mendidik anak yang terdapat pada naskah Wacana Bin Etam (WBE) yakni orang tua mengajarkan sabar pada anak, dengan mengajarkan tauhid; memberikan contoh sikap baik; memberikan nasehat; memberikan sikap tegas; mengamalkan adanya pahala dan dosa; berbaik sangka dan menghindari berburuk sangka; mengajarkan sopan santun; mengajarkan sifat tawakal; mengajarkan sifat tafakur mengajarkan hidup penuh semangat dan tak mudah menyerah serta mengajarkan sikap selalu bersyukur pada Allah dan memulai sesuatu hanya berniat di jalan Allah dan berharap rahmat dari Allah; dan juga mengajarkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun anak berada dan bijaksana dalam mengantarkan ilmu dari usia sedini mungkin.

Perwujudan ideologi Ibuisme saat ini masih ada dan berlaku, namun tidak dengan menghilangkan keaktifan pada gerakan organisasi PKK. Menurut (Rahyu et al., 2019) yang mengulas tentang ideologi Ibuisme pada “Ideologi State Ibuisme Pada Gerakan PKK Di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan” menyatakan bahwa:

“Ideologi State Ibuisme Pada Gerakan PKK Di Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra

Selatan masih ada, walaupun Ideologi State Ibusme masih ada tetapi tidak menyurutkan keaktifan dari organisasi PKK dan tetap meletakkan perempuan pada posisi penting”.

Berdasarkan pemaparan dari peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa ‘Ibuisme Negara’ dalam Era Reformasi saat ini masih ada dan berlaku. Akan tetapi, perwujudan ‘Ibuisme Negara’ saat ini tidak menghilangkan keaktifan dari organisasi PKK melalui gerakan pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan Posyandu, serta pelatihan Dasawisma.

Era Reformasi ini, ideologi ‘Ibuisme Negara’ perlu menghadirkan negara secara efektif pada masyarakat mikro. Kontrol negara saat ini tidak memiliki peranan penting pada tingkat lokal seperti ketika Orde Baru. Menurut (Wicaksono, 2017) bahwa ‘Ideologi Ibuisme’ telah nampak pudar artinya, negara perlu berupaya lebih efektif untuk terus-menerus hadir di masyarakat level mikro. Ibuisme Negara yang identik dengan ‘kesukarelaan’ pada era Orde Baru cenderung muncul karena adanya kontrol pemerintah pusat yang cukup kuat. Pemerintah pusat saat ini, tidak memiliki peran penting pada tingkat lokal melainkan diperankan oleh pemerintah daerah dan lokal. Saat ini, ‘kesukarelaan’ ibuisme muncul pada diri kader-kader PKK tidak berdasarkan perasaan kewajiban seperti Orde Baru melainkan, karena keinginan pribadi kader untuk melakukan upaya pemberdayaan di masyarakat. Peran wanita pada ‘Ibuisme Negara’ dari era Orde Baru hingga saat ini nampak pada upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK.

Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara umum berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya-upaya dalam melakukan pembinaan ketahanan keluarga.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi.
3. Meningkatkan upaya untuk peningkatan kesadaran keluarga dalam pemeliharaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan.
4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring KB.
5. Menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi lebih terbuka.

6. Memperkuat kesetaraan dan keadilan gender.

Kontribusi kerja PKK Desa Sumberjaya, Bekasi dalam upaya pemberdayaan terhadap wanita dapat ditinjau melalui pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan kesediaan pangan, Posyandu, serta pelatihan hidup bersih sehat. Kegiatan tersebutlah, merupakan upaya mewujudkan 'Ibuisme Negara' dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat. Dan PKK di Desa Sumberjaya, Bekasi beranggotakan kaum perempuan dengan berbagai latar belakang pekerjaan seperti ibu rumah tangga, guru, dan bahkan wirausaha. Namun, tetap mampu bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti bahwa bentuk tanggung jawab seorang wanita terhadap suami dengan melayani suami seperti menyiapkan keperluan-keperluan sang suami sebelum berangkat kerja dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya seperti mendampingi anaknya ketika belajar. Hal tersebut, berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis terhadap Ketua TP PKK Desa Sumberjaya yang telah menjabat sejak tahun 2006 yang juga seorang istri dari 3 anak serta pendamping suaminya selaku Kepala Desa dan juga terhadap sebagian dari kader-kader PKK Desa Sumberjaya

Ketika menjadi istri untuk suaminya atau ibu bagi anaknya seorang wanita memerlukan komunikasi yang efektif dalam keluarga. Karena, keluarga adalah lembaga sosial pertama. Tidak hanya mengurus keluarga, komunikasi juga dilakukan oleh perempuan dalam melakukan pemberdayaan yang terdapat pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Komunikasi memiliki peran dalam mengkonstruksikan identitas di dalam PKK. Hal ini juga didukung oleh penelitian menurut (Pratiwi, 2015) bahwa pembentukan identitas dalam PKK pada dasarnya tidak terlepas dari proses komunikasi yang terjadi di PKK. Proses komunikasi di PKK berkaitan dengan bagaimana proses produksi dan penerimaan pesan berlangsung di dalam gerakan PKK, terkait sejauh mana para pengurus dan anggota PKK mampu berkontribusi didalamnya.

Selain itu, PKK Desa Sumberjaya mempunyai team Kelompok Kerja yang

solid sehingga dapat meraih juara 2 lomba PKK se-Jawa Barat dan juara 1 lomba kader PKK tingkat Kabupaten Bekasi. Serta, Tim Penggerak (TP) PKK Desa Sumberjaya memiliki hal yang berbeda dengan TP PKK lain dikarenakan program-program PKK Desa Sumberjaya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh PKK. Berbeda dengan TP PKK lain yang menjalankan program-program pemberdayaan berdasarkan perencanaan yang telah disusun oleh aparatur Desa. Solidaritas seluruh anggota dalam menjalankan program PKK dipengaruhi oleh perilaku komunikasi yang digunakan oleh seluruh anggota PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi melalui pesan verbal maupun nonverbal dalam mengupayakan pelaksanaan program pemberdayaan.

Berdasarkan pemaparan dari materi diatas, kemampuan perempuan dalam mengurus keluarga dan melakukan pemberdayaan bagi lingkungannya, menumbuhkan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang perilaku komunikasi yang dilakukan oleh para anggota PKK Sumberjaya, Kabupaten Bekasi pada gerakan PKK dalam mewujudkan ‘Ibuisme Negara’ era Reformasi.

Terkait dengan permasalahan diatas, peneliti mengambil judul **“Ibuisme Negara Era Reformasi Pada Gerakan PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan signifikansi di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana gambaran konsep ‘Ibuisme Negara’ dipraktekkan dalam gerakan PKK di Kabupaten Bekasi pada Era Reformasi yang ditinjau dari komunikasi gender, bentuk-bentuk gerakan PKK apa saja yang terdapat pada PKK di Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan ‘Ibuisme Negara’, serta dampak gerakan PKK di Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan ‘Ibuisme Negara’ Era Reformasi terhadap kader PKK yang juga ditinjau melalui komunikasi gender.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dibahas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep 'Ibuisme Negara' Era Reformasi dipraktekkan dalam gerakan PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi?
2. Gerakan apa saja yang terdapat pada PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan 'Ibuisme Negara' Era Reformasi?
3. Dampak gerakan PKK dalam mewujudkan 'Ibuisme Negara' Era Reformasi terhadap pengalaman & perilaku komunikasi kader PKK?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran konsep 'Ibuisme Negara' Era Reformasi dipraktekan dalam gerakan PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui gerakan pada PKK Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan 'Ibuisme Negara' Era Reformasi.
3. Mendeskripsikan serta menganalisis dampak gerakan PKK dalam mewujudkan 'Ibuisme Negara' era Reformasi terhadap pengalaman & perilaku komunikasi kader PKK.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan studi Ilmu Komunikasi, serta dapat dijadikan literature dan referensi untuk kajian penelitian dalam bidang Gender & Pemberdayaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga PKK dari tingkat Pusat sampai tingkat Desa untuk memahami lebih jauh tentang

Salsabila Khalilah Saputri, 2021

IBUISME NEGARA ERA REFORMASI PADA GERAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA SUMBER JAYA, KABUPATEN BEKASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

‘Ibuisme Negara’ pada Gerakan PKK Era Reformasi dalam kajian Komunikasi. Serta membantu pemerintah setempat untuk menyusun kebijakan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II.KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan penelitian terdahulu, teori dasar yang berhubungan dengan penelitian serta kerangka konsep dan kerangka pemikiran.

BAB III.METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, sifat penelitian, metode pengumpulan data, penentuan informan, metode analisis data, teknik keabsahan data dan waktu serta lokasi penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penguraian secara mendetail mengenai deskripsi objek penelitian, analisis informan, dan pembahasan

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi yang digunakan peneliti untuk melengkapi pengumpulan data dalam proses pengerjaan penelitian.